



IPB University  
— Bogor Indonesia —

# POLICY BRIEF

2024

## Pendekatan *Socio-Nutrition* untuk Peningkatan IPM



Penulis:

Ali Khomsan

Departemen Gizi Masyarakat  
Fakultas Ekologi Manusia  
IPB University

## Capaian dan Problem IPM Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga bisa menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau suatu negara. Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP) skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sepanjang 2022, menempatkan Swiss di posisi pertama. Negara kita masih berada di peringkat 114 dari 191 negara dengan skor IPM 0,750 (BPS 2024).

IPM mengukur kemajuan dari tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu hidup panjang dan sehat, akses pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Menurut data BPS (2024), rata-rata umur harapan hidup orang Indonesia adalah 74,2 tahun dan rata-rata lama bersekolah 8,8 tahun. Sementara itu, jumlah orang miskin telah berkurang menjadi “hanya” 25,22 juta orang atau 9,36 persen dari total penduduk.

Gizi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Berdasarkan data global, lebih dari 50 persen kematian balita di dunia berkaitan langsung dengan masalah gizi kurang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi (Black *et al.* 2013). Kondisi kurang gizi pada masa awal kehidupan tidak hanya meningkatkan risiko kematian, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang, termasuk kemampuan belajar, produktivitas, dan potensi ekonomi di masa dewasa. Oleh karena itu, mengentaskan masalah kurang gizi pada anak-anak adalah langkah strategis yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meningkatkan harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Kita perlu merenung kembali pencapaian kualitas gizi bangsa. Sudahkah berbagai persoalan gizi dapat diatasi dengan baik? Pandangan pentingnya optimalisasi tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan telah disepakati oleh para ahli kesehatan dan gizi. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah periode emas. Masalah gizi yang terjadi pada rentang usia tersebut menyebabkan seorang anak berada pada posisi *the point of no return*, apakah kelak anak-anak tersebut akan menjadi aset nasional atau justru menjadi beban bangsa.

Kita semua menyadari keterbatasan pemerintah dalam memerangi masalah gizi di tingkat masyarakat, baik dari segi alokasi anggaran, kebijakan lintas sektor, maupun koordinasi pelaksanaannya. Persoalan kurang gizi di kalangan anak balita masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai mengingat dampaknya yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi sumber daya manusia di masa depan. Di sisi lain, anemia gizi besi pada ibu hamil

tetap menjadi tantangan besar, dengan prevalensi yang masih tinggi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Anemia tidak hanya meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan bayi yang dilahirkan (WHO 2021). Dalam hal ini gizi harus ikut berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

## **Socio-Nutrition untuk Mengungkit IPM**

**Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.** Pemerintah telah merumuskan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang kemudian dijabarkan oleh propinsi/kabupaten sebagai rencana aksi daerah. Pihak eksekutif dan legislatif harus memiliki visi dan misi yang sama yang melihat persoalan gizi sebagai masalah besar sehingga pasti juga memerlukan anggaran besar dan berkesinambungan. RAN-PG juga harus disosialisasikan pada berbagai pihak/penta-helix (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat) sehingga semua *stakeholders* bisa mengisi matriks pembangunan gizi di masyarakat. Sinergi penta-helix dalam dalam penanganan masalah gizi sangat diperlukan. Meraih kualitas gizi bangsa adalah tanggung jawab kita semua.

Pada dasarnya bangsa Indonesia tidak sekedar menghadapi masalah gizi makro seperti kekurangan kalori dan protein. Persoalan gizi mikro yang merupakan fenomena masalah gizi tersembunyi seperti defisiensi zat besi, folat, atau mungkin juga selenium dapat menjadi ancaman nyata yang menyebabkan gagal tumbuh di kalangan anak-anak usia dini. Meningkatkan peringkat IPM menjadi tantangan bangsa Indonesia. Kelalaian membangun sumber daya manusia akan menyebabkan generasi muda Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.

**Kriteria Miskin yang Realistis.** Karena persoalan gizi seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses pangan akibat kemiskinan, maka memahami fenomena kemiskinan menjadi sangat penting. Ciri kemiskinan di Indonesia adalah banyak rumah tangga yang berada di sekitar atau sedikit di atas garis kemiskinan nasional, sehingga meski mereka tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan namun menjadi miskin karena tidak dapat mengakses berbagai pelayanan dasar seperti ketersediaan air bersih, perumahan layak huni dsb.

Pendekatan yang umum dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kebutuhan dasar diukur dari pengeluaran (sebagai proksi dari pendapatan) rumah tangga atas sejumlah (bundel) komoditas baik berupa komoditas makanan

maupun nonmakanan. Dari sejumlah komoditas terpilih tersebut kemudian ditentukan ukuran kebutuhan minimumnya. Ini menjadi dasar penetapan batas atau garis (*poverty line*) yang membagi penduduk miskin dan penduduk tidak miskin.

Penggunaan garis kemiskinan yang terlalu rendah untuk pengklasifikasian miskin/tidak miskin dapat memunculkan besaran angka kemiskinan yang keliru. Banyak orang akan terklasifikasi tidak miskin meski sebenarnya kehidupannya sangat menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan, dan tempat tinggal layak (Ravallion 2016). Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan bukan hanya ukuran statistik, tetapi juga alat kebijakan yang menentukan siapa yang menerima bantuan sosial atau intervensi pemerintah.

Kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia. Profil kemiskinan secara keseluruhan dicirikan oleh pendapatan rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk, dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.

Menentukan jumlah orang miskin menggunakan kriteria pendapatan atau pengeluaran sebenarnya sangat sulit. Ini dikarenakan banyaknya rumah tangga di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian tradisional atau sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Oleh sebab itu, dalam penerapan program pengentasan kemiskinan perlu terlebih dahulu ditetapkan indikator kemiskinan (bukan hanya garis kemiskinan). Indikator kemiskinan harus realistis dan mudah penentuannya di lapangan.

Indikator-indikator yang berkorelasi dengan kemiskinan antara lain status sebagai janda tanpa pekerjaan, pendidikan kepala rumah tangga rendah, kecilnya luas lantai rumah, tiadanya fasilitas buang air besar dan sebagainya. Dari aspek gizi dan makanan, indikatornya adalah konsumsi daging atau pangan hewani yang rendah tetapi konsumsi ikan asin tinggi, serta adanya balita bergizi kurang/buruk dan *stunting*.

**Pembaruan Data Kemiskinan.** Di dalam mendata persoalan gizi di masyarakat, saat ini hampir setiap pemda sudah dapat mengidentifikasi faktor determinan penyebab problem gizi di masing-masing daerah. Faktor-faktor determinan ini, antara lain rendahnya status sosial-ekonomi (miskin), yang kemudian harus ditindaklanjuti sebagai salah satu program unggulan untuk mengatasi masalah gizi.

Dengan semakin baiknya identifikasi *by name by address* balita penderita masalah gizi serta identifikasi keluarga-keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka program bantuan langsung untuk mengatasi masalah gizi (khususnya pada balita) dapat lebih tepat sasaran. DTKS adalah data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan penerima bantuan sosial

(bansos). DTKS menjadi landasan pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin.

Kesadaran aparat desa yang merupakan level paling bawah dari birokrasi pemerintahan dituntut untuk melakukan validasi DTKS dengan benar dan jujur, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Validasi yang tepat menjadi kunci agar masyarakat benar-benar menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengalami kerugian akibat kesalahan data. Ketepatan data ini menjadi semakin penting dalam konteks program-program penanggulangan kemiskinan, mengingat dampaknya terhadap alokasi sumber daya dan efektivitas intervensi kebijakan (Prabowo *et al.* 2020).

Tekad untuk memperbaiki data orang miskin di Indonesia harus diwujudkan. Dengan validasi data kemiskinan diharapkan tidak lagi terjadi misklasifikasi orang miskin. Misklasifikasi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menurunkan efisiensi penggunaan anggaran negara (Wijayanti dan Santoso 2022). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi data.

***Corporate Social Responsibility.*** Sudah saatnya kita merangkul industri-industri nasional maupun multinasional untuk bersama-sama memecahkan persoalan gizi masyarakat. Banyak industri-industri dengan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sangat besar yang sebenarnya dapat dirangkul dan diarahkan untuk menggelar program mengatasi kurang gizi di perdesaan atau di daerah kumuh perkotaan. CSR adalah sumberdaya potensial yang dapat membantu pembiayaan program gizi.

Di saat pemerintah memiliki keterbatasan dalam penyediaan anggaran pembangunan gizi, maka seyogyanya kita harus pandai-pandai bersanding dengan industri swasta atau NGO (*Non Governmental Organization*). Studi menunjukkan bahwa pelibatan sektor swasta melalui CSR dapat meningkatkan efektivitas program gizi melalui penyediaan teknologi, akses ke jaringan distribusi, dan keahlian dalam manajemen proyek (Putri *et al.* 2023). Kebersamaan ini tidak hanya akan menguntungkan sebagian masyarakat yang terancam malnutrisi, tetapi juga akan memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam membangun IPM yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, Uauy R. 2013. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*. 382(9890): 427-451. DOI:10.1016/S0140-6736(13)60937-X.
- Prabowo H, Sutaryo S, Suwarno W. 2020. Challenges in managing poverty data in Indonesia: A case study of DTKS implementation. *Journal of Social Policy Research*. 11(3): 315–328. DOI:10.1016/j.jsp.2020.02.001
- Putri DK, Susanti N, Yuliani E. 2023. Public-private partnerships for nutrition improvement in Indonesia: Challenges and opportunities. *Nutrition Policy Journal*. 19(1): 25–40. DOI:10.1016/j.nutpol.2023.03.005
- Ravallion M. 2016. *The Economics Of Poverty: History, Measurement, And Policy*. England: *Oxford University Press*.
- WHO. (2021). *Anaemia*. *World Health Organization*. Diakses dari: <https://www.who.int/health-topics/anaemia>
- Wijayanti E, Santoso T. 2022. Improving Poverty Data Accuracy: Lessons Learned From Indonesia's DTKS Reform. *Public Administration and Development*. 42(1): 78–92. DOI:10.1002/pad.1992